

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KELURAHAN MUNGENG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	<b>5</b>
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>5</b>
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Mungseng Tahun Anggaran 2024	5
Realisasi Belanja APBD Kelurahan Mungseng adalah sebesar Rp. 474.023.765,00 ( Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau tercapai 91,93% dari target sebesar Rp.515.640.000,00 (Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	6
<b>BAB III</b>	<b>7</b>
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>7</b>
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	7
3.1.1. Pendapatan - LRA	7
3.1.2. Pendapatan - LRA	7
3.1.3. Belanja	7
Realisasi APBD Tahun 2024 pada Kelurahan Mungseng sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024 Kelurahan Mungseng. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.	7
3.1.4. Pendapatan - LO	8
3.1.5. Beban	9
3.1.6. Aset	9
3.1.7. Kewajiban	12
3.1.8. Ekuitas Dana	13
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	14
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>16</b>
<b>BAB V</b>	<b>19</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>19</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Mungseng sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ( Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | : PENDAHULUAN   |
| BAB II  | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD             |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD              |
| BAB IV  | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V   | : PENUTUP   |

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Mungseng Tahun Anggaran 2024

**REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD  
KELURAHAN MUNGSENG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>515.640.000,00</b>	<b>474.023.765,00</b>	<b>91,93</b>
a	Belanja Pegawai	1.925.000,00	1.625.000,00	84,42
b	Belanja Barang dan Jasa	478.715.000,00	441.813.775 ,00	92,29
c	Belanja Hibah	25.000.000,00	24.584.990,00	98,33
c	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	6.000.000,00	60%
d	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>515.640.000,00</b>	<b>474.023.765,00</b>	<b>91,93</b>

Realisasi Belanja APBD Kelurahan Mungseng adalah sebesar Rp. 474.023.765,00 ( Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau tercapai 91,93% dari target sebesar Rp.515.640.000,00 (Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.1.925.000,00 (Satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 0,37% dari total anggaran belanja, dengan Realisasi Rp.1.625.000,00 (Satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
2. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.478.715.000 (Empat ratus juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah) atau dari 92,29% dari total anggaran belanja, dengan Realisasi Rp. 441.813.775,00 (Empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
3. Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) atau dari 98,33% dari total anggaran belanja, dengan Realisasi.Rp. 24.584.990,00 ( Dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)
4. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) atau dari 60% dari total anggaran belanja, dengan Realisasi Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah).

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Mungseng Kecamatan Temanggung TA. 2024 yang tidak optimal antara lain:

1. Terdapat perubahan mekanisme perbendaharaan yaitu Tunai dan KKPD, dengan belum siapnya aplikasi KKPD ;
2. Terdapat perubahan Pelaporan Keuangan dari aplikasi e keuangan menjadi SIPD yang butuh penyesuaian.
3. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

3.1.2. **Pendapatan - LRA**

Anggaran pendapatan Kelurahan Mungseng pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pendapatan retribusi daerah, yaitu retribusi pemanfaatan aset daerah, terealisasi sebesar Rp.500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah) atau 100%.

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	500.000,00	500.000,00	0
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000,00	500.000,00	0
4102	Retribusi Daerah	500.000,00	500.000,00	0
410202	Retribusi Jasa Usaha	500.000,00	500.000,00	
41020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0
410202010002	Retribusi Penyewaan Tanah	0	0	0
410202010005	Retribusi Pemakaian Ruang	0	0	0
41020220	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	500.000,00	500.000,00	0
410202200001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	500.000,00	500.000,00	0
	Jumlah Pendapatan	0	0	0



### 3.1.3. Belanja

Realisasi APBD Tahun 2024 pada Kelurahan Mungseng sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024 Kelurahan Mungseng. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

#### REALISASI ANGGARAN (OBJEK) KELURAHAN MUNGSENG TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>515.640.000,00</b>	<b>474.023.765,00</b>	(41.616.235,00)
5	Belanja Pegawai	1.925.000,00	1.625.000,00	(300.000,00)
5102	Belanja Barang dan Jasa	478.715.000,00	441.813.775,00	(36.901.225,00)
5105	Belanja Hibah	25.000.000,00	24.584.990,00	(415.010)
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>515.640.000,00</b>	<b>474.023.765,00</b>	(41.616.235,00)

Jumlah Realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp 474.023.765,00 atau tercapai 91,93% dari target sebesar Rp.515.640.000,00.

#### 1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/ jasa dan belanja hibah. Berikut realisasinya:

- Belanja pegawai terealisasi sebesar 1.625.000,00 atau 84,41% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.925.000,00.
- Belanja Barang/ Jasa terealisasi sebesar Rp. 441.813.775,00 atau 92,29% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 478.715.000,00
- Belanja hibah terealisasi sebesar Rp. 24.584.990,00 atau 98,33% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 25.000.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar

Rp. 6.000.000,00 atau 60% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.10.000.000,00  
 Belanja operasi tidak terserap 100% karena ada sisa anggaran yang tidak dapat dibelanjakan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan.

**3.1.4. Pendapatan - LO**

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	500.000,00
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	500.000,00
7102	Retribusi Daerah-LO	500.000,00
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	500.000,00
	Jumlah Pendapatan	500.000,00

Pendapatan LO Kelurahan Mungseng tahun 2024 sebesar Rp. 500.000,00- ( Lima ratus ribu rupiah).

**3.1.5. Beban**

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	516.411.045,00
81	BEBAN OPERASI	516.411.045,00
8101	Beban Pegawai	1.625.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	443.417.025,00
8105	Beban Hibah	24.584.990,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	46.784.030,00
	Jumlah Beban	516.411.045,00

Beban Kelurahan Mungseng pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 516.411.045,00. Beban tersebut merupakan beban operasi, yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 1.625.000,00, beban barang dan jasa sebesar Rp. 443.417.025,00, Beban Hibah sebesar Rp.

24.584.990,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 46.784.030,00.

**3.1.6. Aset**

a. Aset lancar

- Kas dan setara kas

Kas dan setara kas	2024	2023
	Rp.	Rp.
Kas di bendahara penerimaan	0,00	0,00
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
<b>Jumlah kas dan Setara Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan setara kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,-.

- Persediaan

Saldo persediaan Kelurahan Mungseng per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.322.750,00 dan Rp. 1.362.500,00. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 terinci dalam tabel berikut ini:

Persediaan	2024	Persediaan	2023
Alat Tulis Kantor	69.750	Bahan Lainnya	109.000
Alat Listrik	253.000	Kertas dan Cover	700.000
		Bahan Cetak	250.000
		Bahan Komputer	200.000
		Perabot Kantor	72.500
		Alat Listrik	31.000

<b>Jumlah persediaan</b>	<b>322.750</b>	<b>Jumlah persediaan</b>	<b>1.362.500</b>
--------------------------	----------------	--------------------------	------------------

- Aset Tetap

NO	NAMA REKENING	2024	2023
13	ASET TETAP	2.433.960.270,00	2.467.184.300,00
1301	Tanah	1.704.713.000,00	1.704.713.000,00
1302	Peralatan dan Mesin	279.489.000,00	273.489.000,00
1303	Gedung dan Bangunan	818.654.000,00	818.654.000,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	307.730.000,00	307.730.000,00
1305	Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
1307	Akumulasi penyusutan	(676.692.230,00)	(637.468.200,00)

Nilai Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.433.960.270,00 dan ada mutasi pada aset tetap, Mutasi aset tetap tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut ini:

(637.468.200

Aset Tetap	Saldo Awal 2024	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 2024
Tanah	1.704.713.000,00	-	-	1.704.713.000,00
Peralatan dan Mesin	273.489.000,00	6.000.000,00	-	279.489.000,00
Gedung dan Bangunan	818.654.000,00	-	-	818.654.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	307.730.000,00	-	-	307.730.000,00
Aset Tetap Lainnya	66.500,00	-	-	66.500,00
Akumulasi Penyusutan	(637.468.200,00)	39.224.030,00	-	(676.692.230,00)

Pada tahun 2024 terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 6.000.000,00 yaitu berasal dari belanja modal alat kantor lainnya tahun 2024.

Akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2024 bertambah sebesar Rp. 39.224.030,00, yaitu berasal dari beban penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp. 46.784.030,00) dan berkurang sebesar (7.560.000,00) merupakan koreksi akumulasi penyusutan bangunan gedung.

- Aset Lainnya

NO	NAMA REKENING	2024	2023
15	ASET LAINNYA	0,00	0,00
1504	Aset Lain-lain	3.785.000,00	3.785.000,00
150401	Aset Lain-lain	3.785.000,00	3.785.000,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.785.000,00)	(3.785.000,00)
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.785.000,00)	(3.785.000,00)

Nilai aset lainnya dan akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2024 sama dengan per 31 Desember 2023, atau tidak ada mutasi menambah atau mengurangi yaitu sebesar Rp. 3.785.000,00 dan sebesar Rp. (3.785.000,00).

- Properti Investasi Tanah

NO	NAMA REKENING	2024	2023
16	PROPERTI INVESTASI	7.225.700.000,00	7.225.700.000,00
1601	Properti Investasi Tanah	7.225.700.000,00	7.225.700.000,00
150401	Properti Investasi Tanah	7.225.700.000,00	7.225.700.000,00

Nilai Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 sama dengan per 31 Desember 2023, atau tidak ada mutasi menambah atau mengurangi yaitu sebesar Rp. 7.225.700.000,00 dan sebesar Rp. 7.225.700.000,00 .

### 3.1.7. Kewajiban

#### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2024	Tahun 2023
Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp.5.900.650,00	Rp. 5.337.150,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>Rp.5.900.650,00</b>	<b>Rp. 5.337.150,00</b>

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.5.337.150,00 dan Rp. 5.900.650,00. Utang belanja tahun 2024 terdiri dari utang belanja barang dan jasa sebesar 5.900.650,00 yang terdiri dari:

Nama Utang	Jumlah
Utang jasa tenaga administrasi Bulan Desember 2024	Rp. 2.000.000,00
Utang jasa tenaga kebersihan Bulan Desember 2024	Rp. 1.900.000,00
Utang jasa tenaga keamanan Bulan Desember 2024	Rp. 1.700.000,00
Utang Air bulan Desember 2024	Rp.47.900,00
Utang Telepon bulan Desember 2024	Rp. 252.750,00

#### 2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang	2024	2023
--------------------------	------	------

	Rp.	Rp.
Utang dalam negeri	0,-	0,-
Utang jangka panjang lainnya	0,-	0,-
<b>Jumlah kewajiban jangka panjang</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>

Baik di tahun 2024 maupun pada tahun 2023 tidak ada kewajiban jangka panjang.

### 3.1.8. Ekuitas Dana

Jumlah Ekuitas sampai dengan akhir TA 2024 adalah Rp. 9.654.082.370,00

NO	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	9.688.909.650,00
2	Surplus / (Defisit) LO	(515.911.045,00)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	60.960.000,00
4	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	420.123.765,00
5	Ekuitas Akhir	9.654.082.370,00

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2024.

LRA		LO		Selisih
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 79.200.000,00	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp 79.200.000,00	Rp -
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 22.400.000,00	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 22.800.000,00	Rp 400.000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 20.200.000,00	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp 20.400.000,00	Rp 200.000
Belanja Tagihan Telepon	Rp 3.033.000,00	Beban Tagihan Telepon	Rp 3.033.000,00	Rp -
Belanja Tagihan Air	Rp 1.087.050,00	Beban Tagihan Air	Rp 1.050.550,00	Rp 36.500

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut berbeda, yaitu masing-masing sebesar

	2024	2023
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.000.000	2.000.000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.900.000	1.500.000
Belanja Jasa Tenaga	1.700.000	1.500.000



Keamanan		
----------	--	--

Hal tersebut terjadi karena ada kenaikan Honorarium di Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan di Tahun Anggaran 2024 dan pada pos Tagihan Telepon tidak ada selisih antara LRA dan LO.

Sedangkan Pada Pos Tagihan Air ada selisih Rp. 36.300,00 selisih tersebut terjadi karena terdapat penurunan utang di akhir karena Saluran PDAM yang menuju ke Kantor Kelurahan Mungseng tidak mengalami kebocoran sehingga Tagihan Air menurun.

## **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

Kelurahan Mungseng merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi kecamatan di kabupaten temanggung. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Temanggung. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

### **A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI**

#### **1. ENTITAS PELAPORAN**

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Kelurahan Mungseng.

#### **2. ENTITAS AKUNTANSI**

Entitas akuntansi diselenggarakan oleh unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Berikut adalah Perangkat Daerah beserta alamatnya:

NO	Perangkat Daerah	Alamat
1.	Kelurahan Mungseng	Jl. Tlogomulyo Km. 1,5 Temanggung

#### B. BAGAN ORGANISASI SELAMA TAHUN BERJALAN

NO	Nama	Jabatan
1.	AGUS SUSANTO, SIP	LURAH
2.	ARIEF KURNIAWAN, A.Md	SEKRETARIS KELURAHAN
3.	AHMAD MASHURI	SIE. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  BENDAHARA PENGELUARAN
4.	SITI MAKMUDAH	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	SUMADIYONO	PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI  BENDAHARA PENERIMAAN
5.	SITI MAISAROH, A.Md	TENAGA ADMINISTRASI
6.	UMI FARICHAH	TENAGA KEBERSIHAN
7..	MUCH MUHSIN	TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

		PERLINDUNGAN MASYARAKAT
--	--	----------------------------

### C. INFORMASI GEOGRAFIS

Informasi geografis Kelurahan Mungseng antara lain meliputi :

#### 1. Letak Geografi

Kelurahan Mungseng terletak bentangan dari utara sampai selatan. pada ketinggian 610 m dpl serta berjarak 2 km dari ibu kota kecamatan dan 1,5 km dari ibu kota kabupaten dengan luas wilayah 105.955 ha. Mungseng mencakup daerah seluas 113 ha yang lahannya terbagi atas lahan sawah (69 ha) dan bukan sawah (44 ha). Lahan bukan sawah dipergunakan untuk bangunan/pekarangan, kolam/empang dan lainnya .

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Temanggung II

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Purworejo

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balerejo

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Giyanti

#### 2. Keadaan alam

Wilayah Kelurahan Mungseng merupakan dataran dengan ketinggian antara 500 – 1450 m di atas permukaan laut dan secara geomorfologi, Kemiringan tanah yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak terjal. Adapun sungai yang ada di Kelurahan Mungseng antara lain: Sungai Mbalong, Sungai Ndagen, Sungai Sebungung,

#### 3. Pembagian Wilayah Administratif

Kelurahan Mungseng terdiri dari 4 Rukun Warga dan 19 Rukun Tetangga dengan rincian sebagai berikut :

1. RW I : Lingkungan Kemantenan Sari, 4 RT
2. RW II : Lingkungan Banyukembar, 5 RT
3. RW III : Lingkungan Argodewi, 6 RT
4. RW IV : Lingkungan Daleman, 4 RT

#### 4. Kependudukan

Berdasarkan paparan dari Data Aplikasi Kependuduk Kelurahan Mungseng Tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebesar 3.289 jiwa, terdiri dari 1.669 jiwa laki-laki dan 1.620 jiwa perempuan .

## BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2024 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung , 2 Januari 2025

KEPALA KELURAHAN MUNGSENG

Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang



**NIP.196708281992031010**